



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI

Gedung Prijadi Prapto Suhardjo III Lantai 2
Jalan Wahidin II Nomor 3 Jakarta 10710
Telepon: 3449230 PSW 5505 (021) 29922740 (Direct) Faksimili : (021) 29922742
Situs www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- 287 /WPB.12/KP.10/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Tagihan Jumlah Kewajiban Jatuh Tempo
untuk Pinjaman No. SLA-1195/DP3/2005

9 Maret 2018

Yth. Bupati Aceh Timur
u.p. Kepala DPKAD Kab. Aceh Timur
Jl. Banda Aceh – Medan Km. 223 Aceh Timur

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa kewajiban instansi Saudara yang jatuh tempo pada tanggal 2 April 2018 adalah sebagai berikut:

Pokok	USD	2.478.377,44
Bunga	USD	758.212,85
Denda	USD	318.259,38

Jumlah Kewajiban USD 3.554.849,67

Terhadap jumlah kewajiban jatuh tempo di atas, Saudara diminta untuk mengkonfirmasi apabila terdapat perbedaan perhitungan.

Jumlah Kewajiban yang masih harus dibayar tersebut agar segera dipindahbukukan ke rekening atas nama: **Rekening Dana Investasi k/ Penerimaan Pengembalian Pinjaman Luar Negeri** nomor rekening: **607.000.411.980** di Bank Indonesia Thamrin Jakarta dengan mencantumkan nomor perjanjian penerusan pinjaman dan maksud/tujuan pembayaran.

Selanjutnya, Saudara wajib memberikan konfirmasi kepada KPPN Khusus Investasi sebagaimana form dan petunjuk pengisian terlampir selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah melakukan pembayaran.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor,



Artin Setiyono
NIP 19710409 199803 1 002 f.

Tembusan:

1. Auditor Utama Keuangan Negara II BPK-RI;
2. Direktur Sistem Manajemen Investasi;
Up. Kasubdit Investasi Pemda/BUMD;
3. Bupati Aceh Timur;
4. Kepal BPKRI Perwakilan Prov. NAD;
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NAD.

KEMENTERIAN KEHUTAN DAN PERBURUHAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBURUHAN
KANTOR PELAYANAN
JANABAH
KANTOR PELAYANAN

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA

WILAYAH KERJA